



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN**  
Jl. Lingkar Mulia Agung Pangkalan Balai Banyuasin  
Email: [lapasba@yahoo.co.id](mailto:lapasba@yahoo.co.id)

Pangkalan Balai, 31 Desember 2021

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan  
di-  
Palembang

**SURAT PENGANTAR**

Nomor: W.6.PAS.PAS.10-PR.03- 037

No.	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
01	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan Hormat untuk dipergunakan seperlunya. Demikian untuk maklum.



RONALDO DE VINCI TALESA, A.Md.IP, SH, MH.  
NIP. 19760412 199803 1 001



Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia  
Kantor Wilayah Sumatera Selatan  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( L K I P )  
TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR

Suatu Pemerintahan yang baik apabila menerapkan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai perwujudan penerapan kedua prinsip tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin, sebagai salah satu UPT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada satu tahun tertentu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin ini menyajikan data capaian yang telah diwujudkan selama Tahun 2021, yang mencatat beberapa keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi disamping juga mencatat beberapa hambatan pencapaian keberhasilan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna, namun laporan ini diharapkan dapat menyajikan gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin. Dimasa mendatang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama dan pada akhirnya dapat mewujudkan *good governance* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada umumnya.

Semoga LKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dan seluruh pihak yang berkepentingan, semoga LKIP ini dapat digunakan untuk menilai kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin.



Pangkalan Balai, 31 Desember 2021

KEPALA,



RONALDO DEVINCI TALEXA, A.Md.IP, SH, MH.

NIP. 197604021998031001

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I      PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang.....	2
C. Struktur Organisasi .....	2
D. Maksud dan Tujuan Laporan.....	4
E. Dasar Hukum.....	5
BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja atau Rencana Strategis.....	7
B. Perjanjian Kinerja.....	8
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja .....	10
B. Realisasi Anggaran.....	11
BAB IV    PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	14
B. Saran.....	15
LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

**S**AKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja. Salah satu komponen dalam SAKIP adalah pelaporan kinerja. Penyajian laporan kinerja merupakan pengungkapan atas prestasi kerja yang berhasil dicapai atau belum dapat dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan kinerja intern dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja intern merupakan laporan kinerja yang diselenggarakan pada periode triwulanan sedangkan laporan tahunan merupakan laporan kinerja yang disampaikan oleh kepala satuan kinerja kepada pimpinan unit organisasi dalam hal ini yaitu Kepala Lembaga Masyarakat Kelas IIA Banyuasin.

**L**aporan kinerja tahunan disampaikan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bersamaan dengan laporan keuangan tahunan. LKIP ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Masyarakat Kelas IIA Banyuasin berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Penyajian LKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus disesuaikan dengan sistematika laporan yaitu terdiri dari Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja (Capaian Kinerja Lembaga Masyarakat Kelas IIA Banyuasin dan Realisasi Anggaran Tahun 2021) dan Penutup.

## B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lapas Kelas IIA Banyuasin

Dalam melaksanakan tugas Pemasyarakatan, agar tugas tersebut terlaksana dengan baik, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin mempunyai fungsi sebagai berikut :

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak	Melakukan pembinaan narapidana/ anak didik
	Memberikan bimbingan sosial dan kerohanian pada Narapidana dan anak didik.
	Mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
	Melakukan pemeliharaan KAMTIB Lembaga Pemasyarakatan.
	Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Lapas.
	Melakukan fungsi registrasi dan admisi.

## C. Struktur Organisasi

Sebagaimana diketahui susunan Organisasi Lapas Kelas IIA Banyuasin sebagai berikut:

- a. Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin
- b. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Sub Bagian Tata Usaha:
  - Urusan Kepegawaian dan Keuangan
  - Urusan Umum
- d. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik
  - Sub Seksi Registrasi
  - Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
- e. Seksi Kegiatan Kerja
  - Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
  - Sub Seksi Sarana Kerja
- f. Seksi Administrasi dan Tata Tertib
  - Sub Seksi Keamanan
  - Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Sub Bagian Tata Usaha	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyerat, perlengkapan dan rumah tangga

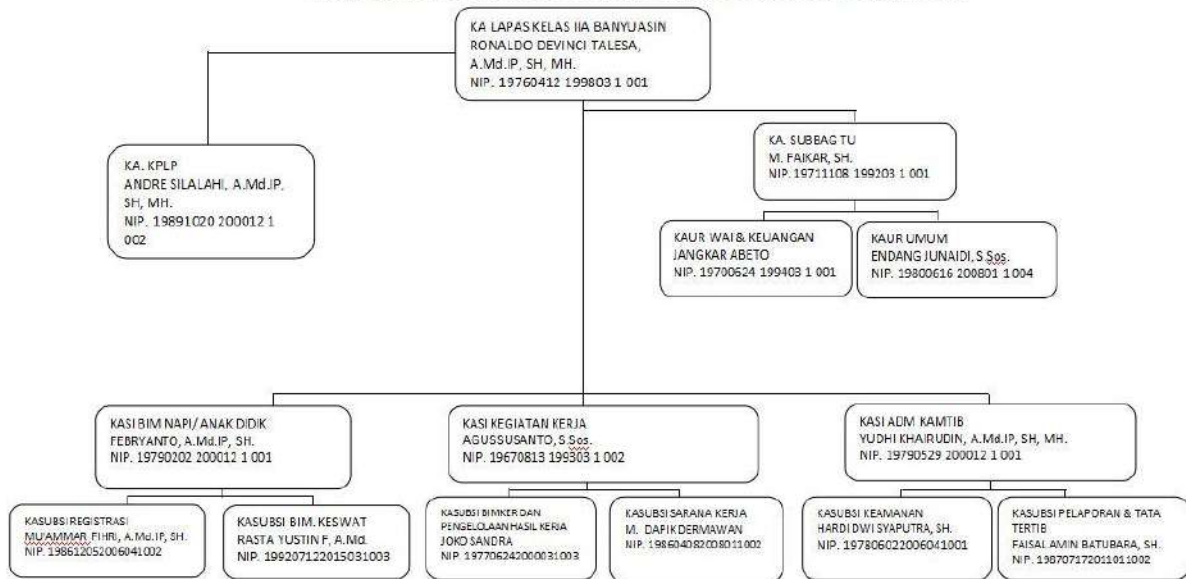
Seksi Binadik	Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana; memberikan bimbingan pemasyarakatan; mengurus kesehatan dan perawatan narapidana/anak didik
Seksi Kegiatan Kerja	Memberikan bimbingan latihan kerja; mempersiapkan fasilitas sarana kerja; mengelola hasil kerja
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dr satuan pengaman yang bertugas
KPLP	Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana; melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

**K**inerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

**S**edangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

**STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA BANYUASIN TAHUN 2021**



**D. Maksud dan Tujuan Laporan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RKAKL) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Tahun 2021;
2. Menyampaikan realisasi anggaran Tahun 2021 terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari seluruh indikator yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKAKL;
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perencanaan dan penetapan kinerja.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disandingkan dengan laporan keuangan/realisasi anggaran pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan pada Tahun 2021;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.



**L**aporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”.

#### E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/ PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lapas Kelas IIA Banyuasin Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

<b>KATA PENGANTAR</b>	Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lapas Banyuasin Tahun 2021.
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Lapas Banyuasin Tahun 2021.
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi dan sistematika penulisan.
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Lapas Banyuasin Tahun 2021, meliputi Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	Menguraikan analisis pencapaian kinerja Lapas Banyuasin Tahun 2021 dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.
<b>BAB IV PENUTUP</b>	Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Lapas Banyuasin Tahun 2021 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### A. Perencanaan Kinerja atau Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa;
2. Tersedianya sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi;
3. Terwujudnya disiplin aparatur peradilan;
4. Terwujudnya program pembinaan kesehatan, kerohanian, dan keterampilan yang lebih baik bagi Narapidana/Tahanan.
5. Terciptanya keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin, sehingga gangguan keamanan dan ketertiban.

**VISI** : Menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan pelayanan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dengan didukung oleh Petugas Pemasyarakatan yang memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tertib pemasyarakatan.

**MISI** :

- ✓ Melaksanakan pelayanan, perawatan, pengamanan, dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang tertib dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang baik;
- ✓ Membangun Kelembagaan yang mewujudkan reformasi birokrasi dengan berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan;
- ✓ Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin guna mendukung pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

**MOTTO** :

**PASBA “TRABAS”**

**Tertib - Rapi – Aman - Bersih - lugAS**

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%

		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

*(Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditandatangani terlampir)*

### **Program dan Anggaran**

Di samping pengukuran terhadap indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap optimalisasi penyerapan anggaran sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Pagu Anggaran Lapas Kelas IIA Banyuasin TA 2021 adalah sebagai berikut:

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1. Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 8.762.375.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 8.762.375.000</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja

**K**inerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

**S**edangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	60%	100%
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%	13%	100%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	75%	100%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	60%	100%
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh	75%	75%	100%

	Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib			
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%	100%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	71%	100%
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%	100%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%	100%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	23%	100%
	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layanan	1 Layanan	100%
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan		1 Layanan	1 Layanan	100%
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	100%
Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	100%
Nilai IKPA		100	100	100%
Nilai SMART		100	100	100

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran
1.	<b>BELANJA</b>				
	1. Belanja Pegawai	4.943.460.000	4.886.126.990	57.333.010	98,84
	2. Belanja Barang	9.788.889.000	9.779.654.535	9.234.465	99,91
	3. Belanja Modal	0	0	0	0
	4. Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0
	5. Subsidi				
	6. Hibah	0	0	0	0
	7. Bantuan Sosial	0	0	0	0
	8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0
		0	0	0	0
2	<b>PENDAPATANA NEGARA DAN HIBAH</b> Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	41.555.908	0	0

Tabel Performance Tahun 2021

Dashboard Performance				
No.	Satuan Kerja	Capaian Kinerja		Performance
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	
1	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin	100	99,55%	100

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAAN 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAAN
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	60%	100%	60%	60%	100%
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%	13%	100%	13%	13%	100%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	75%	100%	75%	75%	100%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	60%	100%	60%	60%	100%
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	75%	100%	75%	75%	100%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%	100%	60%	60%	100%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Taha	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	71%	100%	71%	71%	100%



nan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	100%	92%	92%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%	100%	60%	60%	100%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%	75%	75%	100%
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%	75%	75%	100%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%	100%	60%	60%	100%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/kor ban penyalahgunaan narkotika	23%	23%	100%	23%	23%	100%
	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat		1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
Nilai IKPA		100	100	100%	100	100	100%
Nilai SMART		100	100	100%	100	100	100

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2021 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kurun waktu sepanjang Tahun 2021 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2021 ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tahun 2021 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin pada Tahun 2021 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah SDM Lapas Banyuasin, baik di bidang administrasi, kesehatan maupun penjagaan;
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Banyuasin, khususnya dalam hal Pembinaan bagi Narapidana/Tahanan;

3. Sarana dan prasarana penunjang yang kurang mumpuni, khususnya dalam pelayanan kunjungan, informasi, dan pengaduan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan serta obat-obatan bagi para Narapidana/Tahanan.

Namun, terlepas dari segala hambatan yang dihadapi, Lapas Banyuasin tetap berusaha untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin sesuai standar yang berlaku dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

## **B. Saran**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menguatkan koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan;
2. Meningkatkan kualitas SDM Lapas Banyuasin melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan;
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan;
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Lapas Banyuasin.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Pangkalan Balai, 31 Desember 2021  
KEPALA

RONALDO DEVINCI TALESA, A.Md.IP, SH, MH.  
NIP. 19760412199803 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronaldo Devinci Talesa  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Indro Purwoko  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 30 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum  
dan HAM Sumatera Selatan

  
Indro Purwoko  
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Banyuasin

  
Ronaldo Devinci Talesa  
NIP. 19760412 199803 1 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%
		4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann		
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan		
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan		
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan		
Nilai IKPA	100		
Nilai SMART	100		

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 8.762.375.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 8.762.375.000</b>

Palembang, 30 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum  
dan HAM Sumatera Selatan

  
Indro Purwoko  
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IA Banyuasin

  
Ronaldo Devinci Talesa  
NIP. 19760412 199803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUASIN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ronaldo Devinci Talesa, A.Md.IP, SH, MH.  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 30 Januari 2021

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Banyuasin

  
Ronaldo Devinci Talesa  
NIP. 19760412 199803 1 001